

Kabupaten Bojonegoro sehingga BUMDes HIPPAM menjadi badan usaha dan program pemberdayaan ekonomi desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang pengelolaan BUMDes HIPPAM di Desa Prigi Kanor Bojonegoro, untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi desa perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sumber data di peroleh dari wawancara masyarakat, ketua BUMDes Primatera, ketua HIPPAM, bendahara HIPPAM dan data sekunder peneliti peroleh dari data arsip BUMDes. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data penelitian ini meliputi reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes di desa Prigi sudah berjalan baik sesuai dengan tujuan BUMDes, namun BUMDes unit usaha HIPPAM belum merata karena kurangnya modal dan jaringan. pemberdayaan BUMDes unit usaha HIPPAM, indikator Tamkin Maddi (Materi) masyarakat mengalami perubahan dalam pengeluaran untuk mendapatkan sumber air, dengan adanya HIPPAM harganya lebih terjangkau. Indikator Ma'nawi (secara non materi) dengan adanya HIPPAM mempermudah masyarakat dalam mendapatkan air bersih/air minum, mengurangi terjadinya kecelakaan, memudahkan masyarakat memperoleh air digunakan wudhu jika terjadi pemadaman listrik, pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel, adanya sosialisasi tentang pentingnya pemanfaatan air bersih untuk kehidupan sehari-hari dan memberikan metode Penjernihan.

Kata Kunci: Pengelolaan, BUMDes, Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Islam

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat, maka posisi desa sangat strategis dalam menunjang pembangunan dan perekonomian desa bahkan nasional karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan¹.

¹ I Wayan Sutrisna, Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangunan Ekonomi Desa, 2020, Vol.3 No. 2, Hal. 8-15

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa pada pasal 72 ayat (1) huruf a yang berbunyi “Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa”. Pasal ini telah memberikan peluang yang cukup leluasa untuk menggali sumber-sumber pendapatan desa.

Salah satu upaya desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan pemberdayaan masyarakat desa adalah dengan dibentuknya BUMDes sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat². Hal ini didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 pasal 78 ayat 1 menyatakan bahwa "Dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa" karena desa perlu suatu lembaga potensi yang ada agar meningkatkan perekonomian, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan potensi ekonomi desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang dapat menumbuhkembangkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peraturan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Bojonegoro terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Berbeda dengan badan usaha lainnya, BUMDes dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Bidang usaha BUMDes berjalan dengan mengembangkan potensi desa dan memanfaatkannya sesuai kebutuhan masyarakat. Sebagai Badan Usaha Milik Desa, BUMDes dapat memperkuat perekonomian nasional agar masyarakat desa dapat mengelola potensi ekonomi yang ada³. Hal itu tertuang di Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 3 huruf c bahwa pendirian BUMDes bertujuan: “mendorong usaha masyarakat untuk mengelola potensi ekonomi desa”.

Dari pengelolaan BUMDes diharapkan mampu merevitalisasi perekonomian dengan memberdayakan masyarakat sebagai ujung tombaknya.

²Mario Wowor, Frans Singkoh dan Welly Waworundeng, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kemangka Kecamatan Tompas*, Jurusan Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2019, Vol. 3 No. 3

³ Bahari Wahyu Utomo dan Siti Maimunah Purnamasari, *Potret Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Pilar Pengembangan Ekonomi Lokal Desa*, *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, 2021, Vol. 1, No. 1, Hal 65-72

Selain itu, BUMDes diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa dengan memperkuat dan mengelola potensi desa, seperti yang dimaksud dalam tujuan BUMDes⁴.

Berbicara tentang pemberdayaan Desa Prigi, terdapat tiga indikator didalamnya, yaitu partisipasi masyarakat, peran Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan kemandirian dari segi Pendapatan Asli Desa⁵. Badan Usaha Milik Desa Prigi berdiri sejak 3 Maret 2019. Unit usaha di BUMDes Desa Prigi memiliki enam unit usaha, yaitu Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM), Penyewaan Terop, Internet/WiFi, Bank Sampah, Simpan Pinjam, Pertanian dan Perikanan.

Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum Air (HIPPAM) sebagai salah satu unit usaha BUMDes Desa Prigi mempunyai peran strategis dalam memberikan keuntungan bagi BUMDes Desa Prigi. Hal ini dikarenakan, bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro khususnya Desa Prigi, ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari merupakan kebutuhan pokok⁶.

Ketersediaan air bersih di Desa Prigi sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat, namun ketersediaan air bersih masih sangat terbatas dan tidak memadai. Faktor kurangnya air bersih, yaitu pertama, akses air bersih tidak merata. Kedua, hujannya lebih sedikit. Kabupaten Bojonegoro umumnya tidak banyak menerima curah hujan, terkemuka musim kemarau panjang dan kekurangan air bersih⁷.

Pada penelitian terdahulu oleh Harry Setiawan, Sofiyan Muhlisin dan Gunawan Ikhtiono "Analisis Pengelolaan BUMDes dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus BUMDes Ratu Kemuning Desa Cimanggis Bojonggede Bogor" hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan BUMDes sudah melaksanakan sesuai prinsip pengelolaan dan simpan pinjam sebagai peluang masyarakat untuk meningkatkan pendapatan⁸. Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas

⁴Valentine Queen Chintary dan Asth Widi Lestari, Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dadan Usaha Milik Desa (BUMDes), JISIP: *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 5, No.2 (2016)

⁵ Wawancara dengan Abdul Kamim selaku Ketua BUMDes Primatera pada 26 Oktober 2022

⁶ Wawancara dengan Suyono selaku Ketua HIPPAM pada tanggal 28 Oktober 2022

⁷Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bojonegoro

⁸Harry Setiawan, Sofiyan Muhlisin dan Gunawan Ikhtiono, Analisis Pengelolaan BUMDes dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus BUMDes Ratu Kemuning Desa Cimanggis Bojonggede Bogor, *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2022, Vol. 5, No. 1, Hal 23-37

tentang pengelolaan BUMDes dan menggunakan prinsip pengelolaan BUMDes, perbedaannya, penelitian terdahulu untuk mengetahui pengelolaan BUMDes dan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat sedangkan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan BUMDes yang berfokus pada Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum dan pemberdayaan ekonomi desa.

Penelitian terdahulu oleh Khairunnisa dan Citra Indah Merina "Analisis Kontribusi pengelolaan BUMDes Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan pendapatan Asli Desa di Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul" pada penelitian terdahulu pengelolaan BUMDes Barokah dalam meningkatkan kesejahteraan sudah berjalan baik dilihat kegiatan BUMDes yang dapat meningkatkan wawasan dan keahlian masyarakat⁹.Persamaannya menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang pengelolaan BUMDes terhadap pemberdayaan masyarakat, perbedaannya penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menggunakan prinsip pengelolaan BUMDes, penelitian ini mangacu pada pengelolaan BUMDes Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum.

Berdasarkan unit usaha Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) diharapkan dalam pengelolaannya dapat dilakukan dengan efektif dan efesien upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan, selama berdirinya BUMDes terdapat masalah dalam pengelolaannya seperti kurangnya modal dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan air bersih yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah.

Dengan adanya masalah tersebut, penulis ingin mengetahui pengelolaan BUMDes Primatera unit usaha Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum Air (HIPPAM) dan untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi desa Perspektif Ekonomi Islam.

Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga yang didirikan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk mengelola lembaga tersebut berdasarkan kebutuhan dan perekonomian desa. Pembentukan BUMDes

⁹Khairunnisa dan Citra Indah Merina, Analisis Kontribusi pengelolaan BUMDes Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan pendapatan Asli Desa di Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul, *SEIKO: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2022, Vol. 4, No. 3, Hal 104-122